

**SIARAN PERS**  
**WEBINAR MAFINDO: MEMPERKUAT KEGIATAN FACT-CHECKER DI**  
**INDONESIA**

**28 Maret 2022, Webinar Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dalam rangka memperkuat kegiatan Fact-Checker di Indonesia dan membahas perlunya perlindungan terhadap pemeriksa fakta jurnalis atau non jurnalis di Indonesia.**

Pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Mudah-mudahan mengakses berita, informasi, dan hal yang ingin diketahui adalah manfaat dari perkembangan digital. Namun, dari pesatnya perkembangan tersebut tidak sesuai dengan literasi digital yang ada di Masyarakat Indonesia. Terkadang masih banyak masyarakat yang mendapatkan hoaks bahkan sampai ikut membagikannya. Beruntungnya saat ini media di Indonesia bahkan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) aktif terlibat untuk melakukan pemeriksaan fakta terhadap sebuah informasi, sehingga dapat membantu masyarakat untuk menemukan berita atau informasi yang benar. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk melakukan pemeriksaan fakta terhadap berita atau informasi yang kita terima dan mendukung kegiatan pemeriksaan fakta di Indonesia untuk menangkis maraknya penyebaran hoaks.

Kegiatan pemeriksaan fakta ini tentu bukan sebuah hal yang mudah, beberapa kali kita temui bahwa masih sering terjadi serangan di media digital dari orang yang tidak menyukai kegiatan pemeriksaan fakta oleh jurnalis maupun non jurnalis. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada aturan atau hukum yang mengatur perlindungan terhadap pemeriksa fakta jurnalis maupun non jurnalis di Indonesia hingga beberapa kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik di media digital.

**Eko Juniarto, Presidium MAFINDO** mengungkapkan “bahwa fact-checker yang ada di MAFINDO beberapa kali menerima serangan dari orang yang tidak menyukai kegiatan Pemeriksaan Fakta MAFINDO. ini tentu menjadi perhatian dan memerlukan adanya organisasi atau badan yang menaungi pemeriksa fakta dan jurnalis dalam melakukan pemeriksaan fakta di Indonesia. MAFINDO berharap melalui diskusi ini ada sebuah badan yang menaungi kegiatan pemeriksaan fakta di Indonesia dan membuat standarisasi terkait pemeriksaan fakta sehingga dapat melindungi kegiatan pemeriksaan fakta.”

**Esther Chan, Digital Journalist, Editor Specialised in APAC/ANZ** mengungkapkan “bahwa pengalamannya melakukan pemeriksaan fakta kadang kala tidak terlihat memiliki *impact* pada kehidupan masyarakat atau orang lain percaya, bahwa butuh waktu lama untuk mempublikasikan hasil pemeriksaan fakta, tapi sebenarnya ada alasan untuk melakukan itu, karena Anda harus melakukannya dengan benar, harus mendapatkan semua fakta, dan semua bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah berita benar. Lalu, bagaimana dengan keselamatan para pemeriksa fakta? Belakangan ini kita

hanya fokus pada keamanan digital, tapi kita melupakan akan keselamatan fisik kita, meski kita lebih banyak bekerja secara virtual, namun kehidupan dunia maya dan dunia nyata kita sebenarnya saling berhubungan seperti yang tidak kita bayangkan, dan informasi pribadi tidak seaman yang kita pikirkan, bahkan sangat mudah untuk seseorang bila ingin menemukan kita di dunia nyata, seperti dari jejak *browser* kita, ataupun akun sosial media yang sudah terkena *hack*. “

**Adi Marsiela, Koordinator Cekfakta.com** mengungkapkan “ancaman digital tidak hanya mengancam pemeriksa fakta atau jurnalis, tapi seluruh warga negara. Kenapa? Kita dapat lihat, bahwa warga biasa pun bisa terkena ancaman kekerasan digital, dan latar belakangnya adalah aturan hukum yang memungkinkan orang untuk melaporkan orang lain atas aktivitas di media sosial terkait kebebasan berekspresi. Meskipun, kebebasan berekspresi itu secara Undang-Undang sudah menjadi hak kita sebagai warga negara, karena diaturnya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar, namun selama masih ada aturan di KUHP, seperti pencemaran nama baik, kemudian ada juga aturan di Undang-Undang ITE, itu akan tetap menjadi ancaman buat kita semua yang ada di Indonesia.”

Adanya organisasi atau badan yang menaungi jurnalis dan non jurnalis yang melakukan periksa fakta tentu akan memperkuat gerakan periksa fakta di Indonesia, terlebih dari kalangan masyarakat yang selama ini juga terlibat dalam melakukan kegiatan periksa fakta.

Dengan adanya webinar ini diharapkan dapat mengangkat diskursus dan mendorong usaha-usaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemeriksa fakta di Indonesia dan penyeragaman prosedur kegiatan periksa fakta baik dari jurnalis dan non jurnalis yang di dalamnya memberikan panduan alur kerja cek fakta, termasuk di dalamnya pembuatan konten periksa fakta yang ramah terhadap disabilitas.

Narahubung:

Eko Juniarto (Presidium MAFINDO) – 0816 1900 934

## **Profile Pembicara**

### **Eko Juniarto**

Eko Juniarto adalah pendiri sekaligus presidium MAFINDO, pengampu pemeriksa fakta (fact-checker) MAFINDO dan Program Manager Kelas Kebal Hoaks untuk melatih masyarakat Indonesia melakukan periksa fakta sederhana. Eko Juniarto memiliki gelar sarjana Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (ITB).

### **Esther Chan**

Esther Chan adalah jurnalis digital dari Hong Kong yang terkumpul di organisasi periksa fakta Internasional atau first draft dengan aktifitas sehari-harinya bekerja untuk melakukan verifikasi terhadap sebuah berita.

### **Adi Marsiela**

Adi Marsiela adalah Koordinator cekfaka.com, kolaborasi antar media untuk melawan berita palsu dan pengecekan fakta. Adi Marsiela juga merupakan seorang jurnalis yang aktif dalam melakukan edukasi terkait periksa fakta dan kegiatan periksa fakta. Adi Marsiela memiliki gelar sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran.